



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : KUNTORO BOGA ANDRI
2. Jabatan : KEPALA BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
3. NHK : 633355

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 8.066.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 306 m2/150 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.952.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 223 m2/62.4 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.101.000.000
3. Tanah Seluas 3221 m2 di KAB / KOTA PANGKAJENE DAN KEPULAUAN, HASIL SENDIRI Rp. 176.000.000
4. Tanah Seluas 3238 m2 di KAB / KOTA PANGKAJENE DAN KEPULAUAN, HASIL SENDIRI Rp. 167.000.000
5. Tanah Seluas 250 m2 di KAB / KOTA PANGKAJENE DAN KEPULAUAN, HASIL SENDIRI Rp. 167.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 124 m2/85 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 2.402.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 154 m2/250 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 2.101.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. ----

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ----

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 23.250.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. 191.000.000

Sub Total

Rp. 8.280.250.000

III. HUTANG

Rp. 640.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 7.640.250.000



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.